

PEMILU BERKUALITAS APA MUNGKIN?



Abdul Mu'min Saud., M.Pd.
(Dosen FKIP Universitas Pasundan)

Pendahuluan

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat 2, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilu 2019 tinggal menghitung hari. Pemilihan Umum serentak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bab II tentang Asas, Prinsip, dan Tujuan. Pasal 2 UU NO 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan pemilu serentak dan pemilihan Presiden & Wakil Presiden sudah di depan mata, tinggal menghitung hari untuk memilih anggota legislatif, serta pemimpin negara ini 5 tahun ke depan.

Pemilihan umum legislatif serentak serta pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 April 2019 mendatang merupakan tugas berat yang harus dimaknai sebagai sebuah "pesta demokrasi" bangsa ini. Untuk itu, masyarakat harus siap untuk mengawalinya. Sukses tidaknya Pemilu 17 April 2019 berada ditangan pemilih. Masyarakat memiliki peran sentral untuk menciptakan kedamaian bersama semua komponen yang terkait, baik langsung

maupun tidak langsung dalam suksesnya pemilu legislatif dan Pilpres 17 April mendatang tanpa Golput, tanpa *money politic*, kecurangan, dan intervensi politik dari "pejabat negara dan pejabat partai politik".

Pembahasan

Pelaksanaan pemilu serentak 17 April 2019 yang bermartabat dan berkualitas membutuhkan partisipasi masyarakat secara aktif baik dari kalangan akademisi, hukum, politik

dan semua elemen masyarakat yang menginginkan lahirnya pemimpin negara yang legal dan elegant. Begitu juga pemilu legislatif yang jujur dan adil akan menghasilkan para wakil rakyat yang benar-benar mengapresiasi dan mewakili daerah pemilihannya masing-masing, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

Oleh karena itu, semua pihak penting untuk selalu waspada dan bekerjasama dengan baik, mengingat sudah terjadi berbagai aksi dan tindakan yang sangat tidak terpuji belakangan ini baik melalui medsos, mass media cetak maupun elektronik, yang merusak dan mencoreng komitmen membangun demokrasi yang berkualitas, menciptakan pemilu damai, seperti kampanye hitam yang memfitnah dan menjelek-jelekkan para caleg dari berbagai parpol dan calon presiden, yang berpotensi timbulnya konflik horizontal.

Berbagai kecemasan akan memuncaknya konflik dapat dipahami jika semua pihak tidak mengantisipasinya. Sekecil apa pun potensi tersebut harus dicegah. Untuk itu, semua pihak khususnya *stakeholder* Pemilu (KPU, BAWASLU dan DKPP) agar pemilu terlaksana dengan konsisten, tegas, jujur serta adil. Oleh karena itu, untuk menyikapi berbagai peristiwa tersebut, seperti yang terjadi di Yogyakarta, pecahnya bentrokan antara Gerakan Pemuda Kabah (GPK) yang merupakan organ *underbouw* PPP dengan massa PDIP, masyarakat harus waspada dan hati-hati dalam berbicara dan bertindak agar suasana pesta demokrasi berjalan dengan Luber dan Jurdil.

Berkaca dari banyak negara di

dunia ini, Indonesia merupakan salah satu yang sukses dan mendapat pujian banyak negara dalam menyelenggarakan pemilu. Dibanding beberapa negara lain yang melakukan pemilu dalam suasana teror dan mencekam karena terjadi kekacauan di masyarakat, Indonesia relatif damai dan kondusif dalam berpolitik.

Namun bukan berarti ancaman konflik tidak ada, potensi tersebut tetap harus membuat kita waspada dan meningkatkan kebersamaan serta kerjasama yang lebih kuat lagi antara semua komponen masyarakat dalam menciptakan pemilu yang damai, tenang dan menghasilkan pemimpin negara yang berkualitas, melalui pemilu serentak 17 April 2019 yang bermartabat tanpa kekacauan politik.

Terciptanya pemilu yang damai dan berkualitas, sebenarnya bagian dari wujud nyata karakter bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara dan pijakan masyarakat dalam bermasyarakat di kehidupan sehari-hari, serta diperkuat dengan nafas Bhinneka Tunggal Ika, walau berbedabeda kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Maka, sudah seharusnya kita menghayati dan melaksanakan pesta demokrasi dengan damai dan elegant. Karena dengan pemilu yang damai dan elegant ini, akan menjadikan aktivitas dan tindakan yang damai, santun, untuk kesejahteraan masyarakat secara secara berkesinambungan baik jasmani maupun rohani.

Sebagai negara dan bangsa yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip Pancasila serta Bhinneka Tunggal

Ika, maka tanggung jawab kita bersama, baik masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya untuk merealisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika demi terwujudnya Indonesia yang damai, sejahtera, dan ada dalam ridho Allah Swt. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus benar-benar menjaga netralitasnya, juga dengan semua pihak penyelenggara pemilu sampai kabupaten, kecamatan dan desa, harus benar-benar menjaga netralitas dan independennya, jangan ada upaya untuk memihak salah satu pihak, karena upaya memihak akan mencederai tujuan akhir dari pemilu ini, yaitu "Pemilu yang bermartabat dan berkualitas".

Pihak media, sebagai pilar demokrasi lainnya, memiliki peran yang sangat vital menciptakan pemilu damai dan menciptakan kedamaian di masyarakat. Media harus cerdas dalam menayangkan berita-berita ke masyarakat. Masyarakat media harus memilah mana berita yang layak konsumsi mana berita yang tidak layak, jangan hanya gara-gara kejar rating dan keberpihakannya, maka semua berita-berita diturunkan yang ujungnya akan menciptakan ketidakstabilan situasi politik di masyarakat.

Aparat pemerintah, baik sipil maupun militer juga harus benar-benar netral, sebagai abdi negara. Sistem birokrasi harus netral, jangan menggunakan kekuatan sistem tersebut untuk memihak salah satu kandidat, karena akan merusak upaya menciptakan pemilu damai. Hal tersebut juga ditegaskan Kepala Badan Intelijen negara

(BIN) Budi Gunawan bagaimana agar pemilu dapat berjalan damai, menyatakan "Pemilih jangan sampai merasa bahwa Pemilu 17 April 2019 itu sesuatu yang meresahkan dan menakutkan. Mereka harus merasakan bahwa melalui pemilu ini, mereka punya harapan untuk kondisi Indonesia yang lebih baik". Budi Gunawan juga meyakinkan kalau BIN berkomitmen untuk tetap bertindak profesional dan netral mengawal proses demokrasi ini. Menurutnya antisipasi sudah dilaksanakan optimal, masyarakat tidak usah ragu kepada intelijen, Polri, dan TNI dalam mendukung kesuksesan pemilu yang damai.

Kepala BIN juga mengingatkan pemilu kali ini, merupakan periode transisi yang akan menentukan Indonesia menjadi negara demokrasi ideal yang menjadi model bagi bangsa lain. Beliau mengakui, ada pihak-pihak yang menduga intelijen tidak netral, terlebih dengan adanya beberapa mantan kepala BIN yang menjadi tim sukses di setiap calon presiden. "Saya berpihak kepada rakyat Indonesia untuk pemilu damai demi terciptanya pemimpin negara yang berkualitas dan bermartabat.

Pesan kepala BIN ini sangat penting untuk kita ingat bersama, bagaimana kita rayakan pesta demokrasi ini sebagai suatu pesta yang santai, tenang, santun dan damai, dalam suasana kegembiraan berdemokrasi agar tercipta pemilu yang damai dan bermartabat tanpa kekerasan, kecurangan dan *money politic* guna melahirkan pemimpin yang menjalankan amanat masyarakat untuk mewujudkan

kan kesejahteraan lahir batin Bangsa Indonesia.

Kita harus tunjukkan kepada dunia kalau Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia mampu melewati pesta demokrasi ini dengan baik dan tanpa kekerasan, kita harus mampu menepis banyak anggapan dan kekhawatiran kalau Pemilu 2019 ini akan terjadi konflik horisontal.

Namun tugas kita semua khususnya masyarakat yang harus mampu membuktikan, kalau kekhawatiran dan pendapat tersebut merupakan pendapat yang prematur, dan absurd, karena kita yakin akan mewujudkan Pemilu 2019 yang santun, damai, tenang dan sesuai dengan spirit pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita yakinkan semua pihak, kita yakinkan dunia internasional kalau kita masyarakat Indonesia siap mewujudkan pemilu yang damai. Apalagi Pemilu 17 April 2019 nanti, akan dilaksanakan dalam situasi politik yang panas membara.

Penutup

Mari kita sampaikan pesan moral ini kepada masyarakat luas, sukseskan pemilu berkualitas, damai, dan bermartabat sebagai bagian dari ibadah kita, sebagai upaya kita masyarakat Pancasila yang berkeyakinan untuk bersama-sama menciptakan keharmonisan dan kedamaian di hati, kedamaian di masyarakat dan kedamaian semua umat di dunia.

Untuk itu Pemilu berkualitas, damai dan bermartabat sebagai harga

mati yang harus kita perjuangkan dan wujudkan, siapapun pemenangnya adalah saudara kita yang harus kita hormati dan bagi yang kalah juga merupakan saudara kita yang harus dihormati sebagai putra terbaik yang peran dan kontribusinya tetap harus diakomodir guna menyukkseskan pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan sejahtera.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bab II Asas, Prinsip, dan Tujuan Pasal 2 tentang Pemilu Dilaksanakan Berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas, Raha-sia, Jujur, dan Adil.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Calon presiden dan Calon Wakil presiden Pasal 169.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu Pasal 172.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Peserta Pemilu DPD Pasal 182.
- <http://pilpres2019.kpu.go.id/>
<https://pemilu2019.kpu.go.id/>
<http://www.kawalpemilu.org/>
<http://data-pilpres.umm.ac.id/>
<http://kawal-suara.appspot.com/>
<http://c1yanganeh.tumblr.com/>